



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./ Fax. (021) 3842526 www.kominfo.go.id

Jakarta, 12 Maret 2018

Nomor : 35 /Kominfo/BLSDM/LT.03.07/03/2018
Lampiran :
Perihal : Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika
Kementerian Kominfo Tahun 2018

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di –
Tempat

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo pada Tahun Anggaran 2018 kembali akan melaksanakan Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika.

Program Beasiswa Dalam Negeri Bidang Informatika bertujuan untuk mewujudkan SDM unggul untuk mendukung pengembangan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Swasta, Pemerintah Pusat maupun daerah.

Program Beasiswa Dalam Negeri S2 Bidang Informatika bekerjasama dengan 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dan terbagi sebagai berikut:

I. Program Studi S2 Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan (MTI e-Government)

Program Beasiswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM aparatur pemerintah yang unggul dalam pengembangan e-Government di lingkungan instansi pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sasaran program adalah tersedianya SDM pengelola e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Program Beasiswa S2 ini dilaksanakan bekerjasama dengan Program Studi di 4 (empat) Perguruan Tinggi, yaitu:

- Program Magister keminatan khusus e-Government Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (UGM);
- Program Magister S2 Teknik Elektro Opsi Layanan Teknologi Informasi Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB);
- Program Pascasarjana S2 Bidang Keahlian Telematika Pengelola TIK Pemerintahan Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
- Program Studi MTI e-Government, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI).

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
SIFAT	TGL TERBIT
B/S/P/R	23-3-2018
YDI: SEKMAN	PARAF TU
NAG: R	Pnska

Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali Dosen), anggota TNI serta Polri;
- b. Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
- c. Bagi PNS di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), berusia maksimum 42 tahun pada saat mendaftarkan diri. Daftar daerah 3T mengacu pada Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan. Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) no. 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015;
- d. Berstatus PNS dan TNI/Polri aktif yang memiliki masa kerja minimum 2 tahun terhitung sejak menjadi CPNS;
- e. Mendapat izin dan rekomendasi dari atasan (minimum Eselon II) atau Pejabat yang berwenang memberikan izin Tugas Belajar di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
- f. Belum memiliki gelar dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
- g. Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

II. Program Studi Keamanan Informasi

Program Beasiswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan SDM yang unggul dalam menjamin keamanan informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau Transaksi Elektronik di lingkungan instansi swasta, pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran program adalah tersedianya SDM Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat menjamin keamanan informasi.

Program Beasiswa S2 ini dilaksanakan bekerjasama dengan 2 (dua) Program Studi, yaitu:

- a. Program Magister S2 Teknik Elektro Opsi Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi Sekoiah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI – ITB);
- b. Program kelas khusus Magister Manajemen Keamanan Jaringan Informasi Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI).

Persyaratan bagi pelamar umum (non-PNS) yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa ini adalah:

- a. Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
- b. Mendapat izin dan rekomendasi dari atasan/bagian kepegawaian di Perusahaan tempat bekerja untuk menjalani pendidikan;
- c. Bagi pelamar yang sedang tidak bekerja ataupun wirausahawan, surat rekomendasi diberikan dari Dosen/Pembimbing Akademik di Instansi Pendidikan sebelumnya, dan menunjukkan surat pengalaman usaha atau bekerja selama minimal 2 tahun;
- d. Belum memiliki gelar dan tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
- e. Memenuhi persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

Khusus bagi pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS), persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa S2 Bidang Informatika adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah (kecuali Dosen), anggota TNI serta Polri;
- b. Berstatus PNS dan TNI/Polri aktif yang memiliki masa kerja minimum 2 tahun terhitung sejak menjadi CPNS;
- c. Bagi PNS di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), berusia maksimum 42 tahun pada saat mendaftarkan diri. Daftar daerah 3T mengacu pada Surat Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan. Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) no. 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015;
- d. Mendapat izin dan rekomendasi dari atasan (minimum Eselon II) atau Pejabat yang berwenang memberikan izin Tugas Belajar di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
- e. Tugas dan fungsinya terkait dengan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di instansi yang bersangkutan. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari Unit yang menangani kepegawaiaan dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait, yang ditandatangani di atas materai Rp.6000,-;

Program Beasiswa ini dilaksanakan dengan skema *cost-sharing*, dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo akan menanggung biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan SPP yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi selama masa studi normal. Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo juga memberikan bantuan biaya perkuliahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada setiap penerima beasiswa.

Keterangan mengenai Program Beasiswa S2 Bidang Informatika dapat dilihat pada situs <https://litprofinformatika.kominfo.go.id/beasiswa> atau dapat menghubungi Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Bidang Informatika Kemkominfo melalui email beasiswadninformatika@gmail.com atau beasiswapusbanginfo@kominfo.go.id, dan telepon (021) 3846189 (Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai Laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPALA BADAN LITBANG SDM
NOMOR : 35 /KOMINFO/BLSDM/LT.03.07/03/2018
TANGGAL : 12 Maret 2018

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Pemerintah Pusat (Kementerian/Non-Kementerian/Komisi/Dewan/Badan);
2. Kepala Biro SDM Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di seluruh Indonesia;
3. Asisten Personel (Aspers) Kepala Staf TNI Angkatan Darat/Laut/Udara.
4. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
6. Kepala Dinas Kominfo tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pendidikan tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.